



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**JABATAN DAN KELAS JABATAN HASIL PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait pembayaran tunjangan kinerja pegawai hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan jabatan dan kelas jabatan hasil penyetaraan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelas jabatan yang diduduki oleh jabatan fungsional hasil penyetaraan disamakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN HASIL PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan jabatan dan kelas jabatan hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan dengan kelas jabatan pada jabatan administrasi sebelum dilakukan penyetaraan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRASMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN HASIL
PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

JABATAN DAN KELAS JABATAN HASIL PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	JABATAN SEBELUMNYA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5
1	Analisis Kebijakan	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
4	Analisis Anggaran	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
5	Analisis Hukum	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	JABATAN SEBELUMNYA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5
6	Auditor	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
7	Arsiparis	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
8	Assesor SDM Aparatur	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
10	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
11	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
12	Perencana	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
13	Pranata Komputer	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	JABATAN SEBELUMNYA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5
14	Pranata Hubungan Masyarakat	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11
15	Statistisi	Ahli Muda	Pengawas	9
		Ahli Madya	Administrator bidang Kesekretariatan	12
		Ahli Madya	Administrator non bidang Kesekretariatan	11

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh